
NOTA DINAS
NOMOR: 108/IJ-IND.1/PR/VII/2025

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan PP39 Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 10 Juli 2025

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan PP 39) Inspektorat Jenderal Triwulan II (April-Juni) 2025.

Adapun realisasi keuangan Inspektorat Jenderal sampai dengan triwulan II mencapai Rp18.977.088.218,- atau sebesar 42,88% dengan realisasi fisik sebesar 50%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II ini antara lain:

1. Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2024 pada BDI Denpasar, Politeknik ATI Padang, SMK SMAK Padang, SMK SMTI Padang, BDI Padang, SMK SMTI Pontianak;
2. Pelaksanaan Audit Kinerja Dana Tugas Pembantuan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah TA 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan pada BPIPI Sidoarjo;
3. Audit Kinerja Tahun Anggaran 2024 Bidang Industri KDEI Taipei;

4. Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
5. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak di lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Revisi buka blokir periode I sebesar Rp456.212.000,- dengan peruntukkan untuk pembelian *Videowall* Ruang Rapat serta Operasional Perkantoran Inspektorat Jenderal;
7. Revisi buka blokir periode II sebesar Rp3.255.000.000 dengan peruntukkan perjalanan dinas, saat ini masih dalam tahap pendalaman di Direktorat Jenderal Anggaran;
8. Penerimaan CPNS sebesar 19 Orang dengan penempatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sebanyak 1 orang, Inspektorat I sebanyak 5 orang, Inspektorat II sebanyak 4 orang, Inspektorat III sebanyak 5 orang, dan Inspektorat IV sebanyak 4 orang;
9. Koordinasi dan konfirmasi evaluasi SAKIP unit eselon I Kementerian Perindustrian;
10. Penyusunan Finalisasi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi KRISNA.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

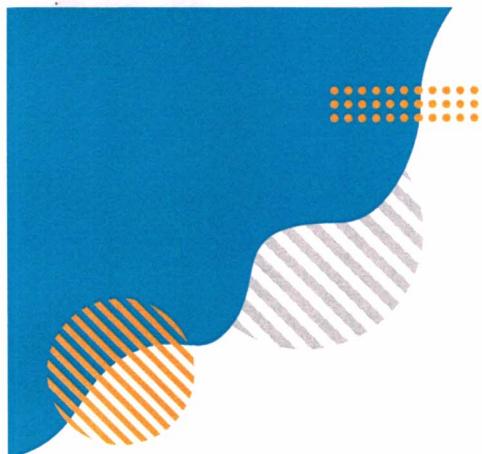
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Emil Satria

Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Para Inspektur.



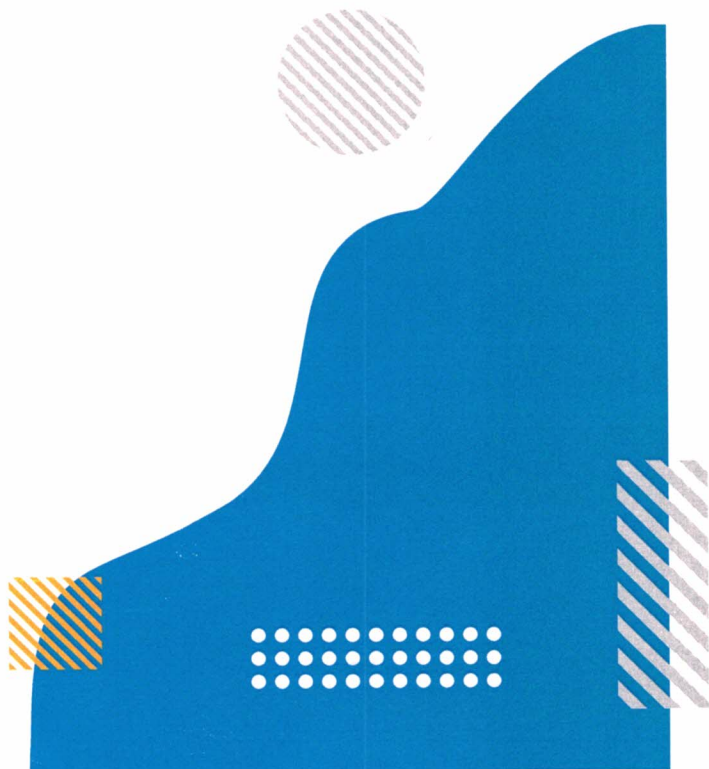
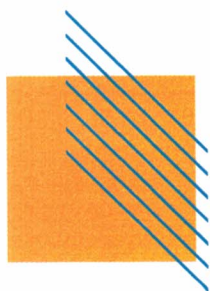
Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PP39

INSPEKTORAT JENDERAL

2025

Triwulan II



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan II Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan tujuan untuk melihat realisasi fisik dan anggaran yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian periode triwulan II tahun 2025.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan di masa datang dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Juli 2025

INSPEKTUR JENDERAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a downward stroke.

M. RUM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan II Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan tujuan untuk melihat realisasi fisik dan anggaran yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian periode triwulan II tahun 2025.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan di masa datang dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Juli 2025

INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.....	4
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal.....	4
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	4
I.3. Struktur Organisasi	5
BAB II.	14
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	14
II.1. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025	14
II.2. Sasaran Program Tahun Anggaran 2025	16
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	20
III.1. Hasil yang Telah Dicapai	20
III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	38
III.4. Langkah Tindak Lanjut	38
BAB IV. PENUTUP.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal	14
Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	16
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025	17
Tabel 4 Realisasi per Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Jenderal.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5 Capaian Renstra Inspektorat Jenderal	22
Tabel 6 Daftar Nilai SAKIP Eselon II Inspektorat Jenderal Tahun 2025	30
Tabel 7 Daftar Nilai SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian	31
Tabel 8 Unit Kerja Yang memperoleh Predikat WBK WBBM	32
Tabel 9 Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2025	36

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

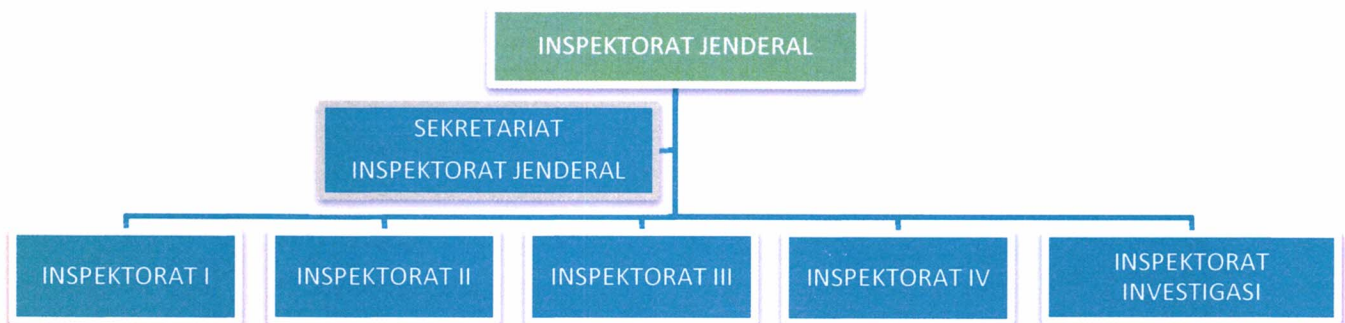
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III;
- Inspektorat IV; dan
- Inspektorat Investigasi

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksana evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c) Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- d) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
- e) Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f) Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- g) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i) Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

a) Kabag Umum	: 1 orang;
b) Fungsional Arsiparis Madya	: 2 orang;
c) Fungsional Analisis SDMA Madya	: 1 orang;
d) Fungsional Analisis SDMA Muda	: 1 orang;
e) Fungsional Auditor Muda Muda	: 1 orang;
f) Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	: 1 orang;
g) Fungsional Perencana Ahli Muda	: 1 orang;
h) Staff	: 22orang;
i) PPNPN	: 9 orang;
j) PPPK	: 7 orang.

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

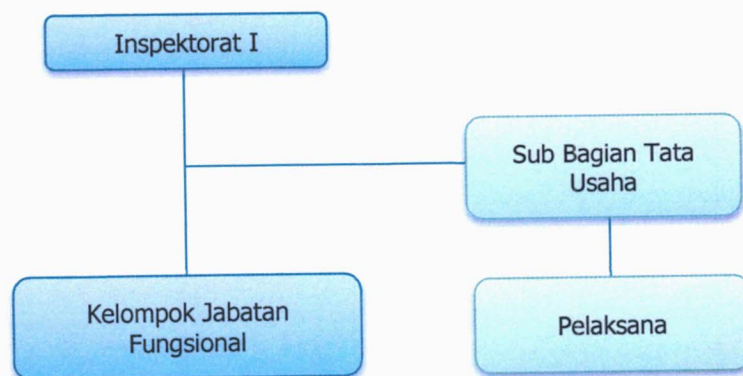
- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan jabatan pelaksana

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior

(minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Sumber Daya Manusia pada Inspektorat I berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 orang;
- b) Auditor Madya : 2 orang;
- c) Auditor Muda : 5 orang;
- d) Auditor Pertama : 7 orang;
- e) Kasubag TU : 1 orang;
- f) PPPK : 1 orang;
- g) PPNP : 1 orang.



Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha

- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan

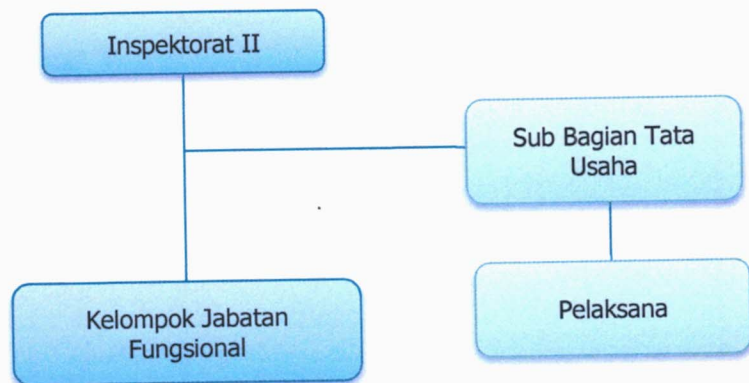
tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat II berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 2 Orang;
- c) Auditor Muda : 5 Orang;
- d) Auditor Pertama : 7 Orang;
- e) Kasubag TU : 1 orang;
- f) Staf : 1 orang;
- g) PPNNP : 1 orang.



Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan

Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jendral, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Inspektorat III terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

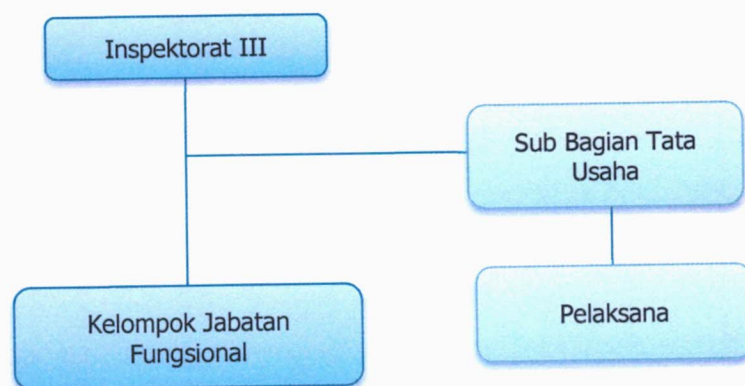
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat III berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 2 Orang;
- c) Auditor Muda : 5 Orang;
- d) Auditor Pertama : 7 Orang;
- e) Kasubag TU : 1 orang;
- f) Staf : 1 orang;
- g) PPNP : 1 orang.



Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal IndustriAgro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

Inspektorat IV terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

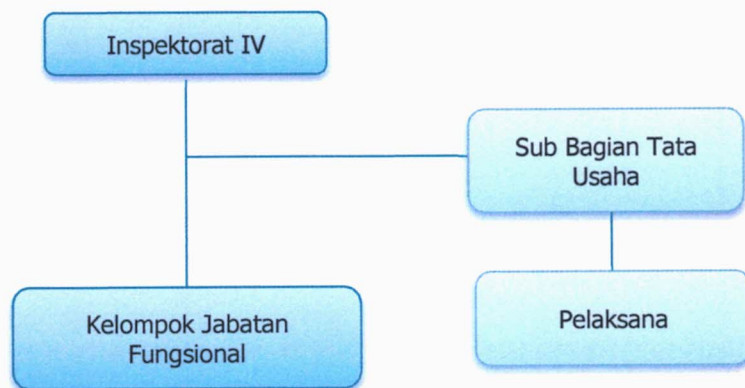
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat IV berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|------------|
| a) Auditor Utama | : - Orang; |
| b) Auditor Madya | : 2 Orang; |
| c) Auditor Muda | : 6 Orang; |
| d) Auditor Pertama | : 6 Orang; |
| e) Kasubag TU | : 1 orang; |
| f) Staf | : 2 orang; |
| g) PPNN | : 1 orang. |



Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat IV

5) Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam melaksanakan Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi;
- b. Pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara;

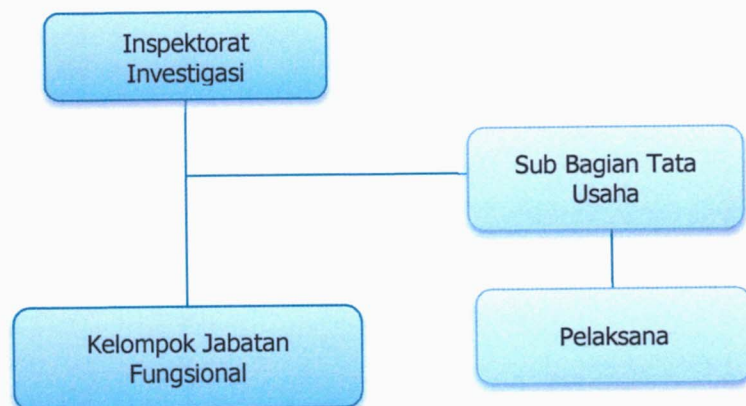
- e. Pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*), pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat;
- f. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, pelaporan kasus kepada instansi penegak hukum;
- h. Penugasan lain berdasarkan instruksi khusus menteri dan/atau inspektur jenderal;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan pada inspektorat investigasi; dan;
- j. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja inspektorat investigasi.

Inspektorat Investigasi terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

2. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



Gambar 6. Bagan Organisasi Inspektorat Investigasi

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

II.1. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Dukungan Manajemen", dengan Visi dan Misi sejalan dengan Visi, Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

2. Misi

1. Meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis SDA dan pengembangan Industri prioritas;
2. Menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. Mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. Mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan;
5. Meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

3. Tujuan

"Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian".

Program Dukungan Manajemen pada Inspektorat Jenderal Tahun 2025 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp44.260.223.000,00, dengan program dan kegiatan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Output Kegiatan Inspektorat Jenderal

No	Program	Kegiatan	Output
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 Dokumen - 5 Dokumen - 194 Laporan

No	Program	Kegiatan	Output
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 dokumen - 5 dokumen - 33 laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 dokumen - 5 dokumen - 175 laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 2 dokumen - 5 dokumen - 28 laporan
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	- Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Teknologi - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Anggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	- 30 Unit - 208 Unit - 2 Dokumen - 5 Laporan - 1 Layanan - 12 Layanan - 393 Unit - 109 Orang - 6 dokumen - 28 dokumen - 16 Dokumen - 10 Laporan

*Sumber: Data POK Revisi 5 Tahun 2025

II.2. Sasaran Program Tahun Anggaran 2025

Adapun Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025 yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Indeks Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	Nilai	82
		Level kapabilitas (IACM) APIP Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> dan penilaian dari BPKP	Nilai	3,21

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,5 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <0,5% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024	80%	Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi Rumus : Penyelesaian yang telah sesuai rekomendasi (SR) dibagi dengan total rekomendasi tahun 2024
		1.3 Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023	20%	Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi Rumus : Penyelesaian yang telah sesuai rekomendasi (SR) dari tahun 2015 sampai tahun 2023 dibagi dengan saldo rekomendasi dari tahun 2015 sampai tahun 2023
		1.4 Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian	13,2%	Jumlah satker yang memperoleh predikat WBK dan WBM dibagi dengan total satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBM dikali 100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		1.5 Nilai SAKIP	79,5	Nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi tim auditor Inspektorat Jenderal
		1.6 Indeks Profesionalitas ASN	81,3	IP ASN dihitung oleh tim kepegawaian masing-masing unit sesuai Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019
		1.7 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	Nilai IKPA disusun atas 13 indikator (program dan keuangan). Nilai didapatkan dari aplikasi SAKTI yang diterbitkan tiap bulan
		1.8 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	85,89	Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian
		1.9 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen	78%	Indikator kinerja ini memuat beberapa pengukuran yaitu: 1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor 2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk 3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran
		1.10 Tingkat Penerapan SPBE	80%	Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri LKE Tingkat Penerapan SPBE
		1.11 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN)=Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, rencana aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025 terlampir pada dokumen ini.

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Hasil yang Telah Dicapai

Pada Triwulan II dilakukan revisi POK ke-3 sampai dengan revisi ke-5, dan tidak merubah pagu awal sebesar Rp44.260.233.000,-. Revisi ketiga terbit pada tanggal 24 April 2025. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 416/SJ-IND.3/PR/IV/2025 tanggal 8 April 2025 Hal Batas Waktu Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan II 2025, dimana Inspektorat Jenderal melakukan revisi Pedoman Operasional Kegiatan dan Halaman III DIPA meliputi penyesuaian realisasi anggaran pada Bulan Januari - Maret, dan penyesuaian rencana penarikan pada Triwulan II - IV. Revisi keempat terbit pada tanggal 17 Juni 2025. Revisi tersebut dalam rangka Sedangkan revisi ke 5 terbit pada tanggal 25 Juni 2025. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran POK untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan, serta perjalanan dinas luar negeri pimpinan.

Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan II ini mayoritas merupakan pelaksanaan kegiatan dan juga pada triwulan selanjutnya, persiapan ini telah terlaksana dengan baik. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian pada Triwulan II Tahun 2025 (Januari-Juni) mencapai Rp18.977.088.218,- atau 42,88% dari total pagu anggaran sebesar Rp44.260.233.000,-. Jumlah anggaran yang di blokir di triwulan II ini mencapai Rp10.269.378.000 atau mencapai 23,20% dari total dana yang tersedia saat ini. Komposisi jumlah anggaran yang terblokir paling banyak terjadi pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan masing-masing Inspektorat diblokir dengan jumlah yang sama. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Realisasi Anggaran Per Unit Kerja Inspektorat Jenderal

Unit Kerja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia (Efektif)	
		Keuangan (Rp.)	%			Jumlah (Rp)	%
Inspektorat I	2.500.000.000	722.722.549	28,91	1.500.000.000	0	277.277.451	11,09
Inspektorat II	2.500.000.000	405.571.960	16,22	1.500.000.000	0	594.428.040	23,77
Inspektorat III	2.500.000.000	555.133.906	22,21	1.500.000.000	0	444.866.094	17,79
Inspektorat IV	2.500.000.000	292.607.002	11,70	1.500.000.000	0	707.392.998	2,83
Sekretariat Ijen	33.890.223.000	17.001.052.801	50,17	4.269.378.000	0	12.619.792.199	37,28
Inspektorat Investigasi	370.000.000	0	0,00	0	0	370.000.000	100
Total	44.260.223.000	18.977.088.218	42,88	10.269.378.000	0	15.013.756.782	33,92

Tabel 5 Realisasi per Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Jenderal

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	19.978.105.000	11.490.272.764	57,51	0	0	8.487.832.236
2	52 Belanja Barang	22.320.118.000	6.467.121.404	28,97	0	10.269.378.000	5.583.618.596
3	53 Belanja Modal	1.962.000.000	1.019.694.050	51,97	0	0	942.305.950
	Jumlah	44.260.223.000	18.977.088.218	42,88	0	10.269.378.000	15.013.756.782
Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto							
Sumber Data: SPAN per 30 Juni 2025							

III.2. Analisa Capaian Kinerja

Tabel 6. Capaian Renstra Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW II	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,5%	Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada triwulan ini adalah sebagai berikut: - Follow Up permintaan dokumen pemeriksaan BPK; - Pelaksanaan Revaluasi BMN sampai tindak lanjutnya - Koordinasi ke DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara); - tindak lanjut saldo dekon dan pemuatakhirannya; - Pre Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2024 oleh BPK-RI; - Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI Semester I Tahun 2024; - Hasil dari koordinasi dan pemuatakhirannya data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal Tahun 2024 masih dalam tahap proses penilaian oleh BPK.	
		Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 *)IKU	80%	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2024 sebesar 83,01%	
		Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015-2023 *)IKU	20%	Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal tahun 2015-2023 sebesar 12,10%	
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian (IKU).	13,2%	Koordinasi pelaksanaan Zona Integritas dengan TPI (Tim Penilai Internal), koordinasi dengan TPN (Tim Penilai Nasional) KemenPANRB, Upload hasil evaluasi Zona Integritas ke Portal RB, penyiapan dokumen-dokumen dan surat terkait evaluasi Zona Integritas. Hasil keberhasilan pembangunan Zona Integritas kemenperin akan diperoleh di TW IV	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW II	Keterangan
		Nilai SAKIP	79,5	Pada Triwulan II telah dilakukan evaluasi penilaian SAKIP Eselon I. Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 84,50 dengan predikat A	
		Indeks Profesionalitas ASN	81,3	Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Tahun 2024 belum dilaksanakan. Rencana pelaksanaan di Triwulan IV. Sebelumnya di bulan Juni telah diadakan Sosialisasi IP ASN yang berlaku di Kementerian Perindustrian oleh Biro OSDM.	
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II (bulan mei) Tahun 2025 sebesar 97,95 . Nilai IKPA ini bersifat fluktuatif sampai dengan akhir tahun anggaran. Delapan indikator yang dinilai dan menjadi masing-masing bobot pada nilai IKPA adalah Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan capaian output	
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		- Penyusunan SOP Kearsipan terkait Surat Rahasia - Bimtek SRIKANDI - Penataan dan pemindahan Arsip - Penyusunan bukti dukung guna pemenuhan data dukung audit Arsip Internal - Melakukan Kegiatan Penyusutan Arsip (Pemusnahan Arsip) Nilai hasil pengawasan kearsipan akan diperoleh di TW IV Tahun 2025	
		Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	78%	Survey kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 akan dilaksanakan di Triwulan IV Tahun 2025	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW II	Keterangan
		Tingkat Penerapan SPBE	80%	Hasil dari Penilaian Mandiri akan diperoleh di Triwulan IV	
		Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal	91%	- Koordinasi dalam rangka persamaan persepsi dalam rangka pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); - Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri pada Triwulan II. Realisasi 83,92%	

Keterangan :



: Telah tercapai



: Tidak Tercapai



: Dalam proses pelaksanaan

Kegiatan pada triwulan II yang telah dilaksanakan pada April hingga Juni 2025 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan

- Mendampingi Menteri Perindustrian dengan Agenda Pertemuan dengan Bapak Jemmy Katiwa, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Reformasi TKDN;
- Rapat Internal dengan Agenda Penyusunan Permenperin dalam rangka Implementasi Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (IJEPA);
- Rapat Internal Terbatas;
- Menghadiri *Kick Off Halal Indonesian International Industry Expo 2025*;
- Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI;
- *Expose* Hasil Audit Kinerja Satker BPSDMI Jakarta dan Banten;
- Ekspose Hasil Audit BDI Jakarta TA 2024;
- Mendampingi Bapak Menteri Perindustrian pada Pertemuan dengan Ibu Amalia Adininggar Widyasanti (Kepala BPS);
- Rapat Internal dengan Agenda Lanjutan Pembahasan Reformasi TKDN;
- Rapat Pimpinan Inspektorat Jenderal Tahun 2025;
- Rapat Internal dengan Agenda Lanjutan Pembahasan Reformasi TKDN;

- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Perkembangan Persiapan Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya (Tindaklanjut Surat dari Dirjen KPAlI);
- Menghadiri *Pre-Event* Aromatika Indofet 2025;
- Rapat Internal dengan Agenda Menerima Laporan tentang Internal Kementerian Perindustrian;
- Rapat Internal dengan Agenda Lanjutan Pembahasan Reformasi TKDN;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Hikirisasi Sektor Agro, Program Bappenas;
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan Konsep Mobil Nasional;
- Rapat Internal dengan Agenda Lanjutan Pembahasan Reformasi TKDN;
- Peresmian Kantin Dharma Wanita Kantor Widya Chandra;
- Rapat Internal dengan Agenda Lanjutan Pembahasan Hilirisasi Sektor Agro;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu Tahun 2025;
- Rapat Internal dengan Agenda Lanjutan Pembahasan Reformasi TKDN;
- Rapat Internal dengan Agenda Lanjutan Pembahasan Hilirisasi Sektor Agro (Kelapa dan Bambu);
- Rapat Internal dengan Agenda Pembahasan PSN, KEK dan Perundingan International;
- Perjalanan Dinas dalam rangka Audit Kinerja TA 2024 Bidang Industri KDEI Taipei;
- Rapat Internal dengan Agenda Lanjutan Pembahasan Industrialisasi Bambu.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Inspektorat I

- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2024 pada BDI Denpasar, Politeknik ATI Padang, SMK SMAK Padang, SMK SMTI Padang, BDI Padang;
- Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja Vertikal Kementerian Perindustrian di Gedung PIDJ Jakarta;
- Koordinasi Tindak Lanjut Audit pada BPSDMI di Gedung PIDJ Jakarta;
- Audit Kinerja pada PTKI Medan, BDI Medan, Poltek IFPK Kendal, BDI Surabaya, SMK SMTI Banda Aceh;

- Koordinasi dengan BPSDMI di PIDI;
- Melaksanakan Tindak Lanjut Penggunaan Aplikasi ALKI di Intranew dan pada IFPK Kendal, Jawa Tengah;
- Reviu Revisi Anggaran Pada BPSDMI;
- Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Aset Tanah Politeknik STTT Bandung;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada BPSDMI TA 2024;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2024 pada SMK SMTI Pontianak;
- Audit pada SMTI Makasar, ATI Makassar, SMK SMAK Makassar, BDI Makassar;
- Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP secara Tatap Muka;
- ST lanjutan Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada BPSDMI TA 2024;
- Sosialisasi Mengenai Tugas dan Fungsi Inspektorat Investigasi serta Pencegahan Risiko Fraud dan Klarifikasi aduan masyarakat mengenai BSPJI Medan.

b. Inspektorat II

- Pelaksanaan Audit Kinerja pada Ditjen IKFT TA 2024 Jakarta;
- Pelaksanaan Audit Kinerja Dana Tugas Pembantuan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah TA 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Pelaksanaan Audit Kinerja Dana Tugas Pembantuan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah TA 2024 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Pontianak;
- Pelaksanaan Audit Kinerja Dana Tugas Pembantuan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah TA 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau Tanjung Pinang, Sumatera Barat Padang, Sulawesi Selatan Makassar dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;

- Pelaksanaan Audit Kinerja pada Ditjen KPAIL TA 2024;
- Menghadiri Undangan Grand Opening Bandung Jewellery Fair;
- Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Penyelesaian Tanah Ditjen IKMA di Bekasi (Ex-Cevest) dan Pemanfaatan Bantuan Peralatan Perbengkelan Roda 2 Ditjen IKMA di Kabupaten Bekasi;
- Audit Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo TA. 2024;
- Pengawasan dan Pendampingan Pemanfaatan Bantuan Peralatan Ditjen IKMA untuk Sentra IKM di Kabupaten Indramayu dan Sumedang;
- Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Pemanfaatan Bantuan Peralatan Ditjen ILMATE kepada BBSPJI Kerajinan dan Batik, Politeknik ATK Yogyakarta, dan SMK-SMTI Yogyakarta.

c. Inspektorat III

- Melaksanakan Pengujian Substansi Audit Kinerja pada BSPJI Palembang, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Manado;
- Penilaian SAKIP Itjen, Pusdatin dan BSKJI;
- Menghadiri Rapat Koordinasi Kegiatan Pengendalian Peta Resiko BSKJI Pusat TA 2025;
- Rapat Pembahasan Penyusunan Permenperin Sanksi Administrasi SIINas Pusdatin;
- Rapat Pembahasan Temuan Audit BPK di BSKJI;
- Melaksanakan Pengujian Substansi Audit Kinerja pada BBSPJILM TA 2024 Bandung, BBSPJIHPMM TA 2024 Makassar, BSPJI Pekanbaru TA 2024, BSPJI Banda Aceh TA 2024;
- Dalam rangka Reviu buka blokir Pusdatin;
- Koordinasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan aset tanah Politeknik STTT Bandung dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin Bandung;
- Rapat koordinasi perencanaan pembangunan budaya resiko dilingkungan BSKJI Pusat;
- Melaksanakan Pengujian Substansi Audit Kinerja pada BBSPJIT Bandung, BBSPJIBBT Bandung, BSPJI Pontianak, BSPJI Medan, BBSPJIKFK Jakarta, BSPJIKKP Yogyakarta, BSPJIKB Yogyakarta TA 2024;

- Melaksanakan Survey Kepuasan Pelanggan Dalam Rangka Pengujian Substansi Audit Kinerja pada BBSPJIT, BBSPJIBBT TA 2024;
- Mendampingi Pimpinan Kunjungan Kerja ke KEK Palu;
- Pelatihan dan Ujian Certified Risk Management Professional;
- Sosialisasi Mengenai Tugas dan Fungsi Inspektorat Investigasi serta Pencegahan Risiko Fraud dan Klarifikasi aduan masyarakat mengenai BSPJI Medan;
- Rapat Sosialisasi Standar Biaya Masukan Tahun 2026.

d. Inspektorat IV

- Pelaksanaan Audit Kinerja pada Ditjen IKFT TA 2024 Jakarta;
- Penyusunan dan Pengadministrasian Dokumen Audit Kinerja pada Ditjen IKFT TA 2024 Jakarta;
- Pelaksanaan Audit Kinerja pada Ditjen KPAIL TA 2024 Jakarta;
- Survey Lapangan dalam rangka Audit Kinerja pada Ditjen KPAIL TA 2024 Bogor, Cikarang, Surakarta, Karanganyar, Surabaya, Jakarta;
- Penyusunan dan Pengadministrasian Dokumen Audit Kinerja pada Ditjen KPAIL TA 2024
- Survey Lapangan dalam rangka Audit Kinerja pada Ditjen KPAIL TA 2024;
- Pelaksanaan Audit Kinerja pada Ditjen KPAIL TA 2024, Atase Perindustrian di Taiwan;
- Menghadiri Undangan Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi e-Monev 2025 Bappenas dan Penggunaan Kembali ALKI.

e. Inspektorat Investigasi

- Sosialisasi Inspektorat Investigasi Kemenperin di SMK-SMTI Aceh dan BSPJI Banda Aceh;
- Tindak lanjut penyelesaian permasalahan aset tanah Politeknik STTT Bandung;
- Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi e-Monev 2025 Bappenas dan Penggunaan Kembali ALKI;
- Menghadiri Kegiatan Penyusunan Gap Analysis Pencegahan Korupsi pada Kementerian & Lembaga;

- Sosialisasi Mengenai Tugas dan Fungsi Inspektorat Investigasi serta Pencegahan Risiko Fraud dan Klarifikasi aduan masyarakat mengenai BSPJI Medan;
- Rapat Koordinasi membahas Evaluasi, Penyusunan Indikator Keberhasilan, dan Bahan Laporan Semester 1 Tahun 2025 pada Pelaksanaan Tugas Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang dipimpin Deputi Bidkoo Kamtibmas, Kemenko Polkam;
- Rapat Lokakarya " Penanganan Konflik Kepentingan di Sektor Publik".

3. Kegiatan Dukungan Pengawasan

- a. Penyusunan laporan yang diselesaikan di Triwulan II Tahun 2025 adalah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal yang berbentuk Nota Dinas, Laporan PP39 Triwulan II Tahun 2025 Unit Eselon I dan II Inspektorat Jenderal, Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2025, Laporan Survei kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2025.
- b. Pengembangan SDM
Kegiatan pengelolaan kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang dilakukan selama Triwulan II (April-Juni) adalah sebagai berikut:

Manajemen SDM APIP pada keikutsertaan diklat:

1. Tiurma Juliani Pardede, Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Madya;
2. Bagus Unggul Yudanta, Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Pertama;
3. Mochammad Adhi Rachmaidi, Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Madya;
4. Rizki Aviandri, Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Madya.

Sharing Knowledge

PKS TUPOKSI Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenperin pada CPNS Tahun 2024

Penerbitan Surat Keputusan/ SK:

- a) Perubahan Pertama Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 08 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Ketua dan Anggota Tim Kerja

- Pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 56 Tahun 2025 tanggal 8 April 2025;
- b) Tim Penilai Internal Zona Integritas Kementerian Perindustrian Tahun 2025 Nomor 82 Tahun 2025 tanggal 21 Mei 2025;
 - c) Pembentukan Tim Penerap dan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 nomor 88 Tahun 2025 tanggal 2 Juni 2025.
- c. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
- i. Menelaah data dan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal pada satuan kerja Kementerian Perindustrian;
 - ii. Koordinator dengan Auditor Pemeriksa untuk verifikasi kesesuaian Dokumen Tindak Lanjut dengan rekomendasi hasil pengawasan internal;
 - iii. Menginventarisir data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - iv. Pemantauan kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
 - v. Menyelenggarakan Rapat Penyusunan Peta Risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Tahun 2025;
 - vi. Menyelenggarakan Rapat Persiapan Evaluasi AKIP Tingkat Eselon I Tahun 2025;
 - vii. Koordinasi dan konfirmasi evaluasi SAKIP unit eselon II Inspektorat Jenderal;

Tabel 7 Daftar Nilai SAKIP Eselon II Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai AKIP
1	Inspektorat II	24,90	24,60	12,30	20,00	81,80
2	Inspektorat IV	24,60	24,60	12,30	20,00	81,50
3	Inspektorat I	24,00	24,90	12,00	20,00	80,90
4	Sekretariat Inspektorat Jenderal	25,20	24,60	10,95	20,00	80,75
5	Inspektorat III	24,00	24,00	12,30	20,00	80,30

- viii. Koordinasi dan konfirmasi evaluasi SAKIP unit eselon I Kementerian Perindustrian, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8 Daftar Nilai SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai AKIP
1	ITJEN	25,20	27,00	12,30	20,00	84,50
2	BSKJI	25,20	26,70	12,30	20,00	84,20
3	Ditjen IA	25,20	25,20	13,05	20,00	83,45
4	Ditjen IKMA	25,20	25,20	12,60	20,00	83,00
5	Ditjen ILMATE	24,60	26,10	12,30	20,00	83,00
6	SETJEN	25,20	25,20	12,75	18,75	81,90
7	Ditjen KPAIL	23,10	24,60	12,30	20,00	80,00
8	BPSDMI	22,80	25,20	12,30	17,50	77,80
9	Ditjen IKFT	23,10	24,60	11,55	17,50	76,75

- ix. Menyelenggarakan Entry Meeting Evaluasi AKIP tingkat unit eselon I tahun 2025;
- x. Monitoring tindak lanjut pengawasan BPKP Tahun 2024;
- xi. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan terkait penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
- xii. Mengkompilasi Data Temuan Kesalahan Akun dan Kapitalisasi Aset untuk Penelaahan;
- xiii. Menyiapkan Data Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2025;
- xiv. Menyiapkan Data Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Triwulan II Tahun 2025;
- xv. Berkoordinasi dengan Tim Pemantauan BPK, Penyampaian Progres Tindak Lanjut Semester I Tahun 2025, serta Inputting Data Tindak lanjut ke SIPTL;
- xvi. Penyusunan Laporan LHKAN Kementerian Perindustrian dan melaporkannya kepada Menteri PANRB;
- xvii. Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024;

- xviii. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- xix. Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Ditjen KPAI Tahun 2025;
- xx. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kinerja Vokasi.

Tabel 9 Unit Kerja Yang memperoleh Predikat WBK WBBM

No	Diusulkan untuk memperoleh predikat WBK	No	Diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM
1	Politeknik APP Jakarta	1	BDI Jakarta
2	BDI Medan	2	BDI Surabaya
3	Politeknik ATK Yogyakarta	3	BBSPJIA
4	BSPJI Banda Aceh	4	BSPJI Banjarbaru
5	BSPJI Ambon	5	BBSPJI Tekstil
6	Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan	6	BDI Makassar
7	Politeknik AKA Bogor		
8	BSPJI Palembang		
9	BSPJI Manado		

- xxi. Pemantauan pelaporan LHKAN untuk wajib Lapo yang belum menyampaikan Laporan;
- xxii. Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025;
- xxiii. Sosialisasi keputusan Menteri PAN RB Nomor 194 Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025;
- xxiv. Kick Off Meeting Survei Penilaian Integritas tanggal 9 Mei 2025;
- xxv. Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 dan penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025 Tanggal 14 – 16 Mei 2025;

- xxvi. Penyusunan dan Penyampaian Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas Tahun 2024. Matriks disampaikan pada tanggal 15 Mei 2025;
- xxvii. Partisipasi Rapat Rencana Pengurangan Lartas Impor Komoditas Sektor Industri pada Pembahasan Deregulasi Tahap II pada tanggal 22 Mei 2025;
- xxviii. *Sharing Session* pengelolaan benturan kepentingan pada tanggal 22 mei 2025;
- xxix. Penyampaian dokumen pra evaluasi Zona Integritas menuju WBK secara mandiri kepada PAN RB tanggal 23 Mei 2025;
- xxx. Melaksanakan Koordinasi seleksi administrasi evaluasi ZI menuju WBK Secara Mandiri;
- xxxi. Penyampaian Hasil Seleksi Administrasi Evaluasi ZI menuju WBK Secara Mandiri kepada Kementerian PANRB melalui portalrb;
- xxxii. Pengumpulan data karakteristik dan data responden survei penilaian integritas tahun 2025;
- xxxiii. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaporan Capaian Strategi Nasional Aksi Pencegahan Korupsi Triwulan II Tahun 2025 (Periode B06);
- xxxiv. Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- xxxv. Penyampaian Laporan Capaian Progres Pelaksanaan Strategi Nasional; Pencegahan Korupsi Periode Triwulan II Tahun 2025 (Periode B06) melalui laman jaga.id;
- xxxvi. Mengikuti Rapat Penentuan Sampling Survei Penilaian Integritas Kementerian Perindustrian.

d. Penyelesaian Program, Evaluasi dan Pelaporan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2025, yaitu:

- i. Revisi DIPA ke-3 dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 416/SJ-IND.3/PR/IV/2025 tanggal 8 April 2025. Hal Batas Waktu Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan II 2025, dimana Inspektorat Jenderal melakukan revisi Pedoman Operasional Kegiatan dan Halaman III DIPA meliputi penyesuaian realisasi

anggaran pada bulan Januari - Maret dan penyesuaian Rencana Penarikan pada Triwulan II - IV;

- ii. Penyesuaian data informasi kinerja pada Krisna Renstra 2025-2029;
- iii. Pengkonsepan awal rencana revisi anggaran ke-4 terkait dengan anggaran Inspektorat Investigasi;
- iv. Rekapitulasi data terkait progress kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal akibat dari adanya Kebijakan Penghematan Anggaran;
- v. Penyusunan Konsep Revisi DIPA relaksasi blokir anggaran pada Belanja Modal dan Belanja Operasional serta pergeseran anggaran untuk Inspektorat Investigasi;
- vi. Permohonan penelitian dan reviu konsep DIPA relaksasi blokir anggaran pada Belanja Modal dan Belanja Operasional untuk Inspektorat Investigasi;
- vii. Konfirmasi dan Pleno evaluasi penilaian SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian;
- viii. Revisi DIPA ke-4 dalam rangka relaksasi blokir anggaran sebesar Rp456.212.000 dengan peruntukan pembelian Videowall Ruang Rapat serta Operasional Perkantoran Inspektorat Jenderal;
- ix. Revisi DIPA ke-5 dalam rangka berupa pemutakhiran POK untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan, serta perjalanan dinas luar negeri pimpinan;
- x. Penyusunan Finalisasi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi KRISNA;
- xi. Melakukan input data program dan anggaran Pagu Indikatif pada Aplikasi SAKTI 2026;
- xii. Menghadiri Trilateral Meeting Pembahasan Rencana Kerja Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2026;
- xiii. Penginputan Rincian Output (RO) ke Aplikasi KRISNA Renstra;
- xiv. Ikut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Lintas Pokja Penyusunan Rancangan RIPIN Tahun 2025-2045;
- xv. Ikut berpartisipasi dalam Rapat Peserta Aplikasi e-Monev 2025 Bappenas dan ALKI Kemenperin.

e. Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal Triwulan II (April- Juni) Tahun 2025

Tabel 10 Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2025

No	MAK/AKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Keterangan
1	6036.EBA.994.002.0B.522141	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II	Rp119.250.000	PT. Bumi Jasa Utama	Kontrak tanggal 20 Maret 2025 BAST tanggal 9 Mei 2025 Pengajuan Pembayaran tanggal 9 Mei 2025 Pembayaran berhasil tanggal 16 Mei 2025
2	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Furniture Penunjang Kegiatan Perkantoran berupa Kursi Rapat dan kursi Pimpinan	Rp47.700.000	CV. Tujuh Samudra	Kontrak tanggal 19 Maret 2025 BAST tanggal 22 April 2025 Pengajuan Pembayaran tanggal 22 April 2025 Pembayaran berhasil tanggal 30 April 2025
3	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Furniture Penunjang Kegiatan Perkantoran berupa Meja Kerja Eselon I	Rp28.400.000	CV. Tujuh Samudra	Kontrak tanggal 10 April 2025 BAST tanggal 17 Mei 2025 Pengajuan pembayaran tanggal 17 Mei 2025 Pembayaran berhasil tanggal 22 Mei 2025
4	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Furniture Penunjang Perkantoran berupa Cabinet Credenza	Rp39.500.000	CV. Tujuh Samudra	Kontrak tanggal 2 Mei 2025 BAST tanggal 26 Mei 2025 Pengajuan pembayaran tanggal 26 Mei 2025 Pembayaran berhasil tanggal 3 Juni 2025
5	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Furniture Perkantoran	Rp375.662.850	PT. Hema Medhajaya	Kontrak : #EP- 01JNZ2K7YCPRGSDN6H2284TG1S tanggal 11 Maret 2025
6	6036.CAN.001.051.A.532111	Pengadaan Tablet Inspektorat Jenderal	Rp38.295.000	PT. Sinergi Solusi Sekawan	Kontrak : #EP- 01JT800M3HHDBH879D9K1DQVNZ tanggal 6 Mei 2025

No	MAK/IAKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Keterangan
7	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Dispenser dan Kulkas Inspektorat Jenderal	Rp5.342.300	PT. Sinergi Solusi Sekawan	Kontrak : #EP-01JTDQ1VWA7JXACXXG6V8Z3E2AV tanggal 14 Mei 2025
8	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Vertical Blind Inspektorat Jenderal	Rp79.853.400	CV. Global Andelis	Kontrak : #EP-01JTSNQYXEKR1AYZMZ6448XWN0 tanggal 15 Mei 2025
Total			Rp 734.003.550,-		

III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Meskipun kegiatan telah dilaksanakan, namun realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2025 hanya sebesar 42,88% dari target yang ditetapkan sebesar 56,72% . Masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan di Triwulan II. Sehingga di Triwulan III diharapkan kegiatan prioritas dan kegiatan lain dapat terlaksana dengan optimal agar target realisasi dapat tercapai.

III.4. Langkah Tindak Lanjut

- a. Agar pelaksanaan kegiatan pengawasan dioptimalkan untuk mencapai target kinerja dan target realisasi anggaran;
- b. Mengusulkan relaksasi blokir anggaran perjalanan dinas untuk menambah sampel audit/cek fisik agar data lebih akurat.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 (Januari-Juni) mencapai Rp18.977.088.218,- atau 42,88% dari total pagu anggaran sebesar Rp44.260.223.000,-. Sehingga dengan demikian, dana yang tersedia saat ini untuk melaksanakan kegiatan sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp15.013.756.782,-. Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan manajemen pengawasan. Sehingga di akhir tahun 2025 perencanaan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal dapat tercapai dengan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum seluruhnya dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan persiapan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Diharapkan Informasi capaian kinerja Triwulan III dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2025 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Rum
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Agus Gumiwang Kartasasmita
Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

PIHAK PERTAMA



M. RUM

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025**

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target
TJ	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima	1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	82
		2 Level Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	3,15
SP.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal	0,5%
		2 Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024	80%
		3 Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023	20%
		4 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian	13,2%
		5 Nilai SAKIP	79,5
		6 Indeks Profesionalitas ASN	81,3
		7 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94
		8 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	85,89
		9 Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen	78%
		10 Tingkat Penerapan SPBE	80%
		11 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91%

Program	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	Rp2.500.000.000,-
	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	Rp2.500.000.000,-
	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	Rp2.500.000.000,-
	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	Rp2.500.000.000,-
	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	Rp34.260.223.000,-

Total Anggaran Tahun 2025 :

Rp 44.260.223.000,-
(Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

MENTERI PERINDUSTRIAN



AGUS GUMIWANG KARTASMITA

Jakarta, 31 Januari 2025
INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM